

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PPh 21 PADA PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP)

Oleh:

**Krisna
NPM 193209044**

Pandemi covid 19 banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan, hal ini mengakibatkan penjualan berkurang, proses produksi berkurang, banyak karyawan yang dirumahkan, dan menurunnya kualitas pembayaran pajak sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan nomor 7 tahun 2021 (UU HPP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan 21 berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2021. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari data pegawai, Standar Akuntansi yang dipakai, dan daftar gaji bulan januari 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan 21 berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2021. Berdasarkan metode tersebut maka hasil penelitian yang diharapkan adalah menghasilkan perhitungan PPh 21 berdasarkan UU HPP dan perbandingan perhitungan PPh 21 berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2021 dan berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Hasil dari penelitian ini berupa perhitungan PPh 21 berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2021 yaitu sebesar Rp245.700. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 yaitu sebesar Rp302.200. Selisih dari perbandingan perhitungan PPh 21 yakni sebesar Rp74.500.

Kata Kunci: *PPh 21, UU HPP, Analisis*

ABSTRACT

ANALISIS PERHITUNGAN PPH 21 PADA PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP)

Oleh:

**Krisna
NPM 193209044**

The COVID-19 pandemic caused many economic sectors to experience a decline in income, this resulted in reduced sales, reduced production processes, many employees were laid off, and the quality of tax payments decreased, so the government issued regulation number 7 of 2021 (UU HPP). This study aims to determine the calculation of Income Tax 21 based on regulation number 7 of 2021. The data in this study are primary data derived from employee data, accounting standards used, and payroll for January 2022. The method used in this study is a qualitative method. . The method used to calculate Income Tax 21 is based on regulation number 7 of 2021. Based on this method, the expected results of the research are to produce PPh 21 calculations based on regulation UU HPP and a comparison of PPh 21 calculations based on regulation number 7 of 2021 and based on Law no. 36 of 2008. The result of this research is the calculation of PPh 21 based on regulation number 7 of 2021, which is Rp. 245,700. The results of the calculation of PPh 21 based on Law no. 36 of 2008 in the amount of Rp. 302,200. The comparison of PPh 21 calculation based on Law no. 36 of 2008 and based on regulation number 7 of 2021, which is Rp. 74,500.

Kata Kunci: *PPh 21, HPP Law, Analysis*